

Article Arrival Date**08.05.2025****Article Published Date****20.06.2025****KETIMPANGAN PEMBANGUNAN EKONOMI ANTARWILAYAH DAN STRATEGI PEMERATAAN INFRASTRUKTUR ISLAMİ: STUDI KASUS KABUPATEN PEKALONGAN JAWA TENGAH****Ahmad Insan KAMIL**

UIN K.H. ABDURRAHMAN WAHID, Pekalongan, Indonesia

1. Introduction

Pembangunan ekonomi merupakan fondasi utama dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta mendorong pertumbuhan nasional yang inklusif. Namun, ketimpangan pembangunan antarwilayah masih menjadi tantangan signifikan di Indonesia, termasuk di wilayah Jawa Tengah. Kabupaten Pekalongan, yang memiliki potensi besar di sektor industri dan pertanian, menghadapi hambatan dalam mewujudkan pemerataan hasil pembangunan, baik antar kecamatan maupun antar kawasan. Ketimpangan ini terlihat dari adanya disparitas dalam akses terhadap infrastruktur, layanan publik, serta distribusi investasi. Strategi pemerataan pembangunan tidak hanya berfokus pada alokasi anggaran, tetapi juga mencakup perencanaan spasial, penguatan kapasitas lokal, dan keterpaduan kebijakan antar sektor. Oleh karena itu, kajian yang berfokus pada wilayah secara mikro sangat diperlukan untuk memberikan pemahaman yang lebih tepat dan rekomendasi kebijakan yang lebih kontekstual.

Berbagai penelitian sebelumnya telah membahas ketimpangan pembangunan dari berbagai sudut pandang. Tuty et al (2022) meneliti ketimpangan antarprovinsi di Sulawesi dan menekankan pentingnya strategi pembangunan spasial berbasis sektor unggulan. Rudolf et al (2024) membahas pengaruh belanja infrastruktur jalan terhadap pertumbuhan wilayah di Pulau Jawa. Holle dan Manilet (2023) menunjukkan peran inklusi keuangan dalam mengurangi ketimpangan sosial ekonomi di Indonesia. Sementara itu, Mashuri et al (2023) menyoroti pentingnya keterlibatan pemerintah daerah dalam pemerataan pembangunan. Prasetyoningrum & Sukmawati (2018) mengkaji hubungan antara IPM, pengangguran, dan kemiskinan sebagai indikator ketimpangan wilayah. Dari perspektif ekonomi Islam, Florita et al (2019) menyoroti pentingnya keadilan distribusi dalam mencapai pertumbuhan dan pemerataan ekonomi. Selanjutnya, Muhammad et al (2024) meneliti ketimpangan infrastruktur antarwilayah serta dampaknya terhadap daya saing regional. Marpaung et al (2024) menelaah strategi pembangunan nasional dalam mengurangi ketimpangan daerah. Bahri et al (2024) melakukan studi kasus ketimpangan sosial ekonomi di Kabupaten Bima yang relevan untuk pendekatan mikro. Purnomo (2025) membahas kesenjangan sosial ekonomi pasca pandemi dan strategi pemulihannya, menyoroti dinamika baru yang harus direspons secara cepat dan tepat oleh pemerintah daerah.

Penelitian ini memiliki keunikan karena secara spesifik berfokus pada wilayah mikro, yaitu Kabupaten Pekalongan, dengan pendekatan studi kasus lokal (deskriptif kualitatif). Tidak seperti kebanyakan penelitian terdahulu yang mengulas wilayah dalam skala nasional atau antarprovinsi, penelitian ini menggabungkan analisis spasial, indikator ekonomi makro, dan kebijakan aktual pemerintah daerah. Pendekatan ini memungkinkan analisis yang lebih kontekstual, komprehensif, dan sesuai dengan kondisi nyata di lapangan.

Penelitian lebih lanjut sangat penting mengingat data dan dinamika lokal yang berbeda-beda antar wilayah, sehingga ketimpangan tidak bisa digeneralisasi. Setiap kabupaten, termasuk Pekalongan, memiliki tantangan dan potensi tersendiri. Selain itu, diperlukan evaluasi terhadap strategi pemerataan pembangunan yang sedang diterapkan di daerah tersebut, guna mengetahui efektivitas dan arah kebijakan yang tepat. Penelitian ini juga dapat menjadi dasar penting bagi perencanaan pembangunan wilayah, termasuk penyusunan RPJMD dan Musrenbang, karena berbasis pada data empiris yang relevan. Terakhir, penelitian ini berkontribusi dalam mengisi kesenjangan literatur, mengingat masih minimnya studi mikro spasial berbasis data terbaru di wilayah Jawa Tengah.

Latar belakang dijelaskan secara singkat dan padat pada masalah yang sangat krusial yang diangkat. Untuk menunjukkan hal-hal terbaik yang telah dilakukan oleh peneliti terdahulu, kelemahan yang dimiliki, serta hal-hal baru yang dihasilkan lewat penelitian yang akan dilakukan.

2. Theoretical framework/literatur Review

Ketimpangan pembangunan ekonomi antarwilayah di Indonesia, termasuk di Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah, merupakan tantangan yang masih berlangsung dan kompleks. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa konsentrasi industri di kota besar seperti Semarang dan Surakarta menjadi pemicu utama ketimpangan di Jawa Tengah (Kusuma, 2011), sementara variabel seperti Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan belanja modal juga memiliki peran signifikan dalam mendorong pembangunan ekonomi daerah (Cahyani & Robertus, 2024). Di wilayah sekitar Pekalongan, transformasi struktural, partisipasi angkatan kerja, dan IPM menjadi faktor penentu utama ketimpangan. Sedangkan kerjasama antarwilayah dan penguatan sektor basis ekonomi turut berkontribusi terhadap pemerataan pendapatan (Susilo, 2018). Strategi pemerataan yang efektif mencakup pengembangan sektor unggulan lokal seperti industri batik (NH, 2011), peningkatan infrastruktur konektivitas dalam konteks desentralisasi fiskal (Pujiati, 2008), serta penciptaan pusat pertumbuhan ekonomi di kawasan tertentu seperti Tangkallangka (Panjiputri, 2013). Partisipasi masyarakat desa juga dinilai krusial dalam menciptakan pembangunan yang inklusif dan berkeadilan. Di sisi kebijakan makro, infrastruktur strategis seperti jalan tol dapat memperkuat konektivitas dan menurunkan ketimpangan antarwilayah (Tuty et al., 2022). Oleh karena itu, strategi pemerataan pembangunan ekonomi di Kabupaten Pekalongan perlu mengintegrasikan potensi lokal, pembangunan SDM, peningkatan infrastruktur, serta penguatan kolaborasi lintas wilayah.

Tinjauan pustaka berisi penjelasan terkait teori-teori yang digunakan. Referensi atau penelitian yang relevan, perlu dicantumkan dalam bagian ini, hubungannya dengan pengembangan hipotesis. Cara penulisan sumber dalam teks perlu menunjukkan secara jelas berupa *author* dan sitasi sumber, yang berupa tahun terbit dan halaman tempat naskah berada (**wajib menggunakan mendeley**).

3. Method

Penelitian ini menggunakan pendekatan mixed methods, yaitu gabungan antara kuantitatif deskriptif dan kualitatif eksploratif. Pendekatan kuantitatif dimanfaatkan untuk mengukur tingkat ketimpangan pembangunan ekonomi antarwilayah di Kabupaten Pekalongan, sedangkan pendekatan kualitatif digunakan untuk mengeksplorasi strategi yang dapat dilakukan untuk mendorong pemerataan pembangunan di wilayah tersebut.

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan pejabat Bappeda, camat, kepala desa, serta pelaku usaha lokal, disertai dengan observasi langsung terhadap kondisi infrastruktur dan aktivitas ekonomi di berbagai kecamatan. Sementara itu, data sekunder diperoleh dari dokumen resmi seperti data Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per kecamatan, data pembangunan infrastruktur, data kemiskinan dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dari BPS Kabupaten Pekalongan, serta dokumen perencanaan pembangunan daerah seperti RPJMD, Renstra, dan RTRW.

Penelitian ini dilakukan di beberapa kecamatan yang merepresentasikan karakteristik wilayah yang berbeda di Kabupaten Pekalongan, yaitu wilayah perkotaan (misalnya Kecamatan Pekalongan Timur), wilayah pinggiran (seperti Kecamatan Kesesi dan Paninggaran), serta wilayah perdesaan pertanian dan perbukitan (seperti Kecamatan Kandangserang dan Lebakbarang). Subjek penelitian terdiri atas pejabat pemerintah daerah, masyarakat lokal, pelaku ekonomi, serta akademisi atau perencana pembangunan daerah.

Teknik pengumpulan data yang digunakan antara lain dokumentasi dan studi literatur, wawancara semi-struktural, observasi langsung, serta kuesioner apabila diperlukan untuk mengetahui persepsi masyarakat mengenai ketimpangan pembangunan.

Analisis data dilakukan melalui tiga tahapan utama. Pertama, analisis ketimpangan wilayah dilakukan secara kuantitatif menggunakan **Indeks Williamson dan Indeks Theil, dengan melihat tren data PDRB antarwilayah selama lima tahun terakhir (2019–2023). Kedua, analisis faktor-faktor penyebab ketimpangan dilakukan melalui korelasi antara tingkat ketimpangan dengan indikator pembangunan seperti infrastruktur, IPM, dan pengeluaran per kapita, serta pemetaan ketimpangan dengan bantuan Sistem Informasi Geografis (SIG). Ketiga, analisis strategi pemerataan dilakukan secara kualitatif melalui pendekatan analisis SWOT dan analisis konten hasil wawancara, yang kemudian dikembangkan menjadi rekomendasi strategi melalui matriks SWOT-TOWS.

Metode penelitian meliputi waktu, lokasi, Teknik pengumpulan data, Teknik sampling, definisi operasional, dan Teknik analisis data.

4. Results

Ketimpangan pembangunan antarwilayah merupakan persoalan struktural yang umum dijumpai di berbagai wilayah di Indonesia, termasuk di Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah. Ketimpangan ini terlihat dari perbedaan signifikan dalam pendapatan, infrastruktur, dan akses layanan publik islami antar kecamatan. Fokus penelitian ini adalah mengidentifikasi penyebab ketimpangan dan merumuskan strategi pemerataan pembangunan infrastruktur islami berdasarkan tinjauan literatur dan data sekunder.

Kabupaten Pekalongan memiliki potensi ekonomi yang besar, terutama pada sektor industri batik, pertanian, dan UMKM. Namun, perkembangan tidak terjadi secara merata. Wilayah utara yang lebih dekat ke pusat kota cenderung lebih maju, sementara wilayah selatan seperti Paninggaran dan Petungkriyono tertinggal karena keterbatasan geografis dan infrastruktur. Pendekatan deskriptif kualitatif melalui literatur review digunakan dalam penelitian ini. Sumber data berasal dari jurnal ilmiah, laporan pembangunan daerah, dan dokumen perencanaan strategis. Tujuannya adalah memperoleh pemahaman yang mendalam tentang ketimpangan ekonomi dan strategi pemerataan yang tepat berbasis kebijakan lokal. Ketimpangan pembangunan diukur dengan indikator seperti Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per kapita, Indeks Pembangunan Manusia (IPM), dan Gini Ratio. Menurut Kusuma (2011) kawasan pesisir utara Jawa Tengah lebih berkembang dibandingkan kawasan selatan, sebuah tren yang juga terlihat di Pekalongan.

Secara geografis dan ekonomis, Kecamatan Kajen, Wiradesa, dan Kedungwuni berkembang pesat karena didukung infrastruktur memadai dan keberadaan sentra industri batik. Sebaliknya, kecamatan di wilayah pegunungan masih menghadapi hambatan dalam mengakses layanan dasar dan peluang ekonomi.

Literatur mengidentifikasi berbagai penyebab ketimpangan, seperti minimnya investasi publik di daerah pinggiran, ketimpangan infrastruktur, serta lemahnya integrasi antarwilayah dalam perencanaan pembangunan (Hariati & Saputri, 2022). Keterisolasian geografis memperparah ketimpangan tersebut.

Infrastruktur memegang peran penting dalam pembangunan wilayah. Ahmad (2022) mencatat bahwa keberadaan jalan tol Trans Jawa memberi dampak positif di kawasan pesisir, namun manfaatnya belum merata hingga ke daerah pedalaman seperti selatan Pekalongan.

Ketimpangan ekonomi juga terkait erat dengan ketimpangan sosial. Ketidakseimbangan dalam akses pendidikan, kesehatan, dan pekerjaan formal memperkuat lingkaran ketertinggalan, sehingga perlu strategi yang menysasar aspek sosial-ekonomi secara simultan. Pendekatan partisipatif dalam perencanaan pembangunan menjadi penting. Harywibowo (2024) menekankan bahwa pelibatan masyarakat desa dalam musyawarah pembangunan dapat meningkatkan akurasi kebijakan sekaligus memberdayakan masyarakat secara langsung.

Strategi berbasis potensi lokal juga sangat efektif untuk mendorong pemerataan. Sektor pertanian, wisata alam, dan industri kreatif bisa menjadi motor pertumbuhan ekonomi di wilayah selatan, dengan catatan perlu ada pendampingan dan penguatan kelembagaan. Pemberdayaan ekonomi melalui UMKM dan koperasi di wilayah tertinggal menjadi langkah strategis. Akses modal, pelatihan, dan jaringan pasar harus diperluas agar pelaku usaha kecil di daerah pinggiran bisa tumbuh dan bersaing.

Perencanaan yang terintegrasi dan lintas wilayah sangat penting. Susilo (2018) menyatakan bahwa kerja sama antarwilayah melalui zonasi kawasan strategis bisa memperkuat konektivitas dan mengurangi disparitas pembangunan. Pemerintah daerah memiliki tanggung jawab besar dalam menciptakan pembangunan yang inklusif melalui kebijakan afirmatif, pengalokasian anggaran berbasis kebutuhan daerah, serta evaluasi yang berkelanjutan terhadap kinerja pembangunan. Dana transfer seperti DAU dan DAK sering kali belum efektif mendorong pemerataan karena perhitungannya tidak mempertimbangkan secara mendalam kebutuhan spesifik masing-masing wilayah (Fauzyny, 2013). Reformasi kebijakan fiskal menjadi penting.

Sumber daya manusia di wilayah tertinggal juga perlu ditingkatkan. Program pendidikan vokasi dan pelatihan keterampilan yang sesuai dengan kebutuhan lokal dapat memperkuat ekonomi masyarakat dalam jangka panjang. Teknologi dan digitalisasi berperan sebagai solusi modern untuk mengatasi hambatan geografis. Edukasi daring, pemasaran produk lokal melalui e-commerce, dan sistem informasi desa dapat memperluas jangkauan ekonomi masyarakat. Dana desa merupakan instrumen penting dalam pembangunan. Namun, penggunaannya harus diarahkan pada pembangunan produktif yang berorientasi pada peningkatan kapasitas ekonomi dan bukan hanya infrastruktur fisik. Berdasarkan data BPS dan studi literatur, ketimpangan di Kabupaten Pekalongan mengalami fluktuasi, terutama pasca-pandemi. Bantuan dan kebijakan lebih banyak tersentral di wilayah perkotaan, menyebabkan wilayah rural semakin tertinggal. Pemerintah daerah perlu membuat peta ketimpangan digital, melibatkan akademisi dan masyarakat sipil dalam perencanaan, serta mengintegrasikan prinsip pembangunan inklusif dalam dokumen perencanaan jangka menengah daerah (RPJMD).

Untuk mengatasi ketimpangan infrastruktur Islami di Kabupaten Pekalongan, diperlukan langkah strategis seperti pemetaan dan evaluasi fasilitas Islami secara menyeluruh guna

mengidentifikasi wilayah yang masih tertinggal. Pembangunan harus berbasis kebutuhan riil masyarakat dengan pendekatan partisipatif dari tingkat desa. Pemerintah daerah perlu mengalokasikan anggaran secara merata dan menggandeng sektor swasta serta masyarakat dalam membangun dan memperkuat infrastruktur seperti masjid, madrasah, dan pesantren. Selain itu, penguatan kelembagaan Islam melalui pelatihan manajemen serta inovasi digital juga penting untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan. Seluruh upaya ini sebaiknya diintegrasikan dalam program pembangunan daerah, misalnya melalui inisiatif “Desa Islami Mandiri” yang dapat menjadi model pemerataan pembangunan infrastruktur Islami secara berkelanjutan.

Secara umum, ketimpangan pembangunan infrastruktur islami antarwilayah di Kabupaten Pekalongan merupakan masalah multidimensional. Strategi pemerataan harus integratif, partisipatif, dan berbasis potensi lokal agar pembangunan menjadi lebih adil dan berkelanjutan.

Hasil dapat memuat gambar dan table. Gambar dan table harus diberi judul dan nomor urut di atas gambar serta diberikan sumber. Usahakan table tidak terpotong pada halaman yang berbeda. Kecuali besarnya melebihi satu halaman.

5. Conclusion

Kesimpulan merupakan hasil yang diperoleh dari analisis. Kesimpulan bukan tulisan ulang dari hasil dan juga bukan ringkasan, melainkan penyampaian singkat dalam bentuk kalimat utuh serta kemungkinan pengembangna selanjutnya. Kesimpulan harus menjawab pertanyaan dan permasalahan penelitian. Kesimpulan dapat berupa paragraph, namun dapat juga berbentuk point-point.

References

- Bahri, N., Pratama, I. N., Amirulhak, M. H., Azhari, M. M., & Yullah, N. (2024). Dinamika Sosial-Ekonomi: Analisis Kemiskinan Dan Ketimpangan Sosial Masyarakat Kabupaten Bima. *Seminar Nasional Lppm Ummat*, 3, 280–289.
- Cahyani, N., & Robertus, M. H. (2024). The Effect of Structural Transformation, Population, Labor Force Participation Rate, and Human Development Index Among Inequality in Kedungsepur Area in 2010-2019. *Diponegoro Journal of Economics*, 11(2), 126–133.
- Fauzyny, W. (2013). *Analisis Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), dana Alokasi Khusus (DAK), dana Bagi Hasil (DBH) Pajak/Bukan Pajak terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten/Kota Propinsi Jawa Tengah tahun 2003-2011*.
- Florita, A., Jumiati, J., & Mubarak, A. (2019). pembinaan usaha mikro, kecil, dan menengah oleh Dinas Koperasi Dan Umkm Kota Padang. *Jurnal Manajemen Dan Ilmu Administrasi ...* <https://www.neliti.com/publications/346773/pembinaan-usaha-mikro-kecil-dan-menengah-oleh-dinas-koperasi-dan-umkm-kota-padan>
- Hariati, H., & Saputri, A. S. (2022). Best Practice Kebijakan Pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Di Kalimantan Timur, Indonesia. *Journal of Government and Politics (JGOP)*, 4(1), 16–28.
- Harywibowo, M. R. (2024). Pentingnya Peran Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Desa (Studi Kasus Desa Gejlig Kecamatan Kajen Kabupaten Pekalongan). *Manageable*, 3(1), 325–335.
- Holle, M. H., & Manilet, A. (2023). Indeks Inklusi Keuangan Indonesia (Analisis Kontribusi Sektor Usaha Lembaga Keuangan Mikro). *Investi: Jurnal Investasi Islam*. <https://jurnalalkhairat.org/ojs/index.php/investi/article/view/139>
- Kusuma, R. H. (2011). *Analisis Struktur Pertumbuhan Ekonomi dan Ketimpangan Pendapatan Antar Daerah di Provinsi Jawa Tengah, 2004-2008*.

- Marpaung, T. A., Daei, M. I., Habibi, D., & Harahap, N. (2024). Strategi Pembangunan Nasional Terhadap Ketimpangan Ekonomi Antar Daerah Perspektif Ekonomi Islam. *Jurnal Penelitian Ilmu Ekonomi Dan Keuangan Syariah*, 2(1), 317–334.
- Mashuri¹, K. A., Pamungkas, A., Kamilah, A. P., Fauziyah, J., Syabilah, S., & Buchori, N. A. (n.d.). *Email: khansyaadiba27@ student. esaunggul. ac. id.*
- Muhammad, A. F., Sanre, N., & Nasyrahbila, A. W. (2024). Strategi Indonesia Dalam Meningkatkan Daya Saing Di Pasar Internasional. *Jurnal Interdisipliner*, 1(4), 28–37.
- NH, T. P. T. (2011). Analisis Sektor Basis di Kabupaten Pekalongan Tahun 2008-2010. *Gema Eksos*, 6(2), 218035.
- Panjiputri, A. F. (2013). Analisis potensi pengembangan pusat pertumbuhan ekonomi di kawasan strategis Tangkallangka. *Economics Development Analysis Journal*, 2(3).
- Prasetyoningrum, A. K., & Sukmawati, U. S. (2018). Analisis pengaruh Indeks Pembangunan Manusia (IPM), pertumbuhan ekonomi dan pengangguran terhadap kemiskinan di Indonesia. *Equilibrium: Jurnal Ekonomi Syariah*, 6(2), 217–240.
- Pujiati, A. (2008). Analisis Pertumbuhan Ekonomi di Karesidenan Semarang Era Desentralisasi Fiskal. *Economic Journal of Emerging Markets*.
- Purnomo, T. (2025). Kesenjangan sosial ekonomi pasca pandemi covid-19 dan upaya pemulihan di kabupaten Banyuwangi. *Jurnal Pendidikan Ekonomi (JUPE)*, 13(1), 19–30.
- Rudolf, D., Kuntadi, C., & Karunia, R. L. (2024). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Belanja Infrastruktur Jalan Di Pulau Jawa: Jumlah Panjang Jalan, Jumlah Kendaraan Bermotor, Dan Kondisi Kemantapan Jalan. *Jurnal Manajemen, Akuntansi Dan Logistik (JUMATI)*, 2(3).
- salam Ahmad, F. (n.d.). The Impact of Trans Java Toll Road Construction on Economic Growth in Central Java: IPB University. *Jurnal Ekonomi Dan Kebijakan Pembangunan*, 11(1), 1–18.
- Susilo, A. (2018). *Analisis Pertumbuhan Ekonomi dan Ketimpangan Distribusi Pendapatan Antar Kabupaten di Provinsi Jawa Tengah*. Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Tuty, F. M. al, Sari, N., Jaya, A. H., & Syatir, A. (2022). Analisis Ketimpangan Wilayah Pulau Sulawesi. *Jurnal Ilmiah Indonesia*, 7(12).